

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Joko Widodo, 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Sarundadjang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kata Hasta.
- Rochmat Soemitro, 2008, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu).
- Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers).
- M. Solly Lubis, 2019, *Hukum Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Ed.1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratminto. Atik Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik – Edisi Ketiga*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Direktorat Jenderal Pajak, 2019, *Blueprint Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System)*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- OECD, 2020, *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*, Paris: OECD Publishing

- Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Siti Resmi, 2022, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bernald L. Tanya, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Sutyoso, 2021, *Aspek Hukum Digitalisasi Administrasi Publik*, Bandung: Refika Aditama
- Dwiyanto Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: UGM Press
- Bambang Sutyoso, 2018, *Aspek Hukum Pelayanan Publik*, Bandung: Refika Aditama
- Sinambela Lijan Poltak, 2019, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara
- W. Riawan Tjandra, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Ahmad Fauzan, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2020
- Muhammad Rizal Akbar, *Tanggung Jawab Administrasi Negara terhadap Kesalahan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Publik*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021
- Siti Aisyah Ramadhani, *Perlindungan Data Wajib Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan Digital*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
- Indah Permata Sari, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sistem*

Administrasi Perpajakan Berbasis Elektronik, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.

JURNAL

- Yongky Rangga Yuda Nugraha, 2025, *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan melalui Coretax terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak oleh Wajib Pajak Menengah*, Jurnal Administrasi Profesional, Volume 6 Nomor 1, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, hlm.83
- L. Y. Hari Sih Advianto, 2018, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Wajib Pajak dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia*, Simposium Nasional Keuangan Negara, Pengadilan Pajak, Jakarta, hlm.406-413
- Christea Nicole Abigail et al, 2025, *Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat*, Socio-political Communication and Policy Review Volume 2 Nomor 5, Universitas Udayana, Bali.
- Nur Rohim Yunus, 2022, *Negara dan Tanggung Jawab atas Pelayanan Publik Berbasis Digital*, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 2.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2021, *Penyelesaian Sengketa Pajak dan Perlindungan Hak Wajib Pajak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18 Nomor 1
- Nurul Qamar, 2021, *AAUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 28 Nomor 3
- Indra Rahmatullah, 2023, *Error Sistem Elektronik sebagai Dasar Gugatan Administratif*, Jurnal Hukum Administrasi, Volume 4 Nomor 2
- M. Zulfa Aulia, 2022, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sistem Administrasi Perpajakan Digital*, Jurnal Pajak Indonesia, Volume 6 Nomor 1
- Gunadi, 2019, *Asas Keadilan dalam Sistem Perpajakan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 4 Nomor 2
- Yustinus Prastowo, 2020, *Kepastian Hukum dalam Administrasi Perpajakan Modern*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 9 Nomor 1
- Jazim Hamidi, 2016, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*

dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 23 Nomor 4

- Y. Sri Pudyatmoko, 2018, *Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Prinsip Good Governance, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25 Nomor 1*
- Afdil Hamdani, Edi Haskar dan Nessa Fajriyana Farda, 2023, *Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak, Jurnal Hukum Amnesti, Volume 5 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Bukittinggi*
- Supriyadi, Beny Setiawan dan Randy Matius Bintang, 2019, *Evaluasi Lembaga Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang Adil di Direktorat Jendral Pajak, Jurnal Pajak Indonesia, Volume 2 Nomor 2, Politeknik Keuangan Negara STAN*
- Nabiatu Sa'adah, 2019, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Nomor 1, Universitas Diponegoro*
- Anneke Pratiwi et al, 2026, *Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, Volume 2 Nomor 1, Universitas Bina Sarana Informatika*
- Astika Putriana et al, 2026, *Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna CoreTax dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah, Riset dan Jurnal Akutansi, Volume 10 Nomor 1, Politeknik Negeri Tanah Laut*
- Luki Natika, 2024, *Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan yang Lebih Baik, The World of Public Administration Journal, Volume 6 Nomor 1, Universitas Subang*
- Selvi Ayu Lestari et al, 2023, *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Ekombis Review, Volume 11 Nomor 2, Universitas Dehasean, Bengkulu*

- Asyifa Tiara Ardin et all, 2022, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela*, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 2 Nomor 1, Politeknik Keuangan Negara STAN
- Dear Filzah Nurhaeni et all, 2025, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan*, *Jurnal Sosial Politika*, Volume 6 Nomor 1, UPN Veteran Jakarta
- Sondang Sijabat dan Putu Anna M, 2022, *Relevansi Hukum Administrasi Negara sebagai Pembataskekuasaaan Pejabat Negara dalam Pelaksanaan Pemerintahan*, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 4 Nomor 6, Universitas Negeri Semarang
- Christiea Nicole Abigail dan Komang Adi Sastra Wijaya, 2025, *Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta*, *Pusat,Socio-Political Communication and Policy Review*, Volume 2 Nomor 5, Universitas Udayana
- Martinus Sony Erstiawan, 2025, *Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia: Analisis Content Media*, *Jurnal Manajemen dan Akutansi*, Volume 5 Nomor 2, Universitas Dinamika, Surabaya
- Vany Adelia Putri, 2025, *Perancangan Manajemen Risiko Operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, *Jurnal Teknik Informatika dan Sitem Informasi*, Volume 11 Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesha
- Ivan Kanel dan Demson Tiopan, 2025, *Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Volume 8 Nomor 2, Universitas Maranatha
- Widoretno Putri, 2014, *Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagai Alat Uji Hakim Memutus Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 19/G/2011 dan Putusan Nomor 24/G/2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)*, Universitas Diponegoro

Yayatul Mu'awanah et all, 2026, *Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dalam Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak*, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Volume 4 Nomor 1, Universitas Primagraha, hlm. 140-141

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem
Administrasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan
Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Administrasi
Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Keputusan DJP Nomor 67/P3/Tahun 2025 tentang Keputusan Direktur Jendral
Pajak tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi atas
Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak yang
Terutang dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Sehubungan
dengan Implementasi *Coretax* DJP

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025 tentang
Keputusan Direktur Jendral Pajak Tentang Kebijakan Penghapusan
Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau
Penyetoran Pajak yang Terutang dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Sehubungan dengan Implementasi *Coretax* DJP

PENG-19/PJ.09/2025 tentang Ralat atas Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Nomor PENG-18/PJ.09/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak yang Terutang

SUMBER INTERNET

- Pajak.go.id, 2025, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/inovasi-teknologi-demi-kemudahan-layanan-pajak> diakses pada tanggal 7 Agustus 2025.
- Pajak.go.id, 2025, <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax> diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.
- Redaksi, 2025, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/16613/anggaran-core-tax-system-rp204-triliun-untuk-apa-saja-ini-kata-djp> diakses pada tanggal 9 Agustus 2025.
- Ayopajak.com, 2025, <https://ayopajak.com/2025/07/23/coretax-vs-djp-online-lama-mana-yang-berlaku-di-2025/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2025.
- Money.compas.com, 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/07/15/103425426/pelaporan-coretax-tak-semudah-bayangan-umkm-paling-sulit-adaptasi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2025, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/transformasi-digital-administrasi-pajak-antara-inovasi-dan-tantangan-literasi>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.
- Pajak.go.id, 2024, , <https://www.pajak.go.id/id/berita/adakan-siaran-langsung-penyuluh-pajak-bahas-coretax-di-instagram>, diakses pada 25 Februari 2026
- Infobanknews.com, 2026, <https://infobanknews.com/631-659-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-lewat-coretax-per-26-januari-2026/>, diakses pada 26 Januari 2026
- Kompas.com, 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/03/13/093900526/penerimaan-pajak-anjlok-ekonom--biang-keladinya-permasalahan-coretax>, diakses pada 25 Januari 2026